

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD ANGGARAN

Selly Rinda Hariono ^{1*}, Isnan Murdiansyah ²

^{1*,2} Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

E-mail: sellyrinda@gmail.com¹⁾

isnanmurdiansyahakt@uin-malang.ac.id²⁾

Abstrak

Sektor pemerintahan sering mengalami banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh fraud dimana hamper setiap korupsi yang dilakukan melebihi 10 miliar dalam beberapa kasus besar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud anggaran di Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan sampel sebanyak 65 responden. Teknik analisis menggunakan Regresi Linier Berganda dengan SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, begitu juga dengan pengawasan internal yang tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud anggaran, sementara pengawasan pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud anggaran, dan semua variabel ini memiliki pengaruh besar terhadap pencegahan fraud saat diuji secara simultan.)

Kata kunci: *The Implementation of Public Sector Accounting; Internal Supervisio;, Financial Management Supervision; Budget Fraud Prevention*

Abstract

The government sector frequently experiences significant losses due to fraud, where in many major cases, almost every instance of corruption exceeds 10 billion. This research was conducted with the aim of finding out the influence of the implementation of public sector accounting, internal supervision, and supervision of financial management on preventing budget fraud in the Malang City Government. This research was conducted using quantitative research methods. Samples were taken using a purposive sampling method, resulting in a sample of 65 respondents. Multiple Linear Regression as an analysis technique using SPSS Version 25. The results of the research showed that the influence of the implementation of public sector accounting had no effect on fraud prevention, nor did internal control have an effect on budget fraud prevention, while financial management supervision had a positive effect on budget fraud prevention and all These variables have a big influence on fraud prevention when testing is carried out simultaneously.

Keywords: *The Implementation of Public Sector Accounting; Internal Supervisio;, Financial Management Supervision; Budget Fraud Prevention*



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Segala tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan disebut fraud. Kecurangan sendiri, juga dikenal sebagai fraud, dapat terjadi di mana pun dan dalam bentuk apa pun (Vousinas, 2019). Fraud paling sering terjadi di lingkungan bisnis, baik di perusahaan sektor publik maupun sektor privat. Dengan melakukan upaya pencegahan, perusahaan atau organisasi dapat mengurangi penipuan. Upaya untuk mencegah kecurangan dikenal sebagai pencegahan kecurangan. Ini dilakukan dengan menekan faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan sehingga kecurangan dapat dihindari. Tujuan utama pencegahan fraud adalah untuk

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan fraud terjadi. Berbagai komponen, seperti kesadaran anti-fraud, pengendalian internal, dan pengetahuan tentang fraud, berkontribusi pada pencegahan penipuan. (Lubis & Budiwitjaksono, 2022)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter tahun 2019 terhadap 239 responden, ditemukan bahwa jenis fraud yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, dengan persentase sebesar 64.4% atau dipilih oleh 154 responden. Jenis fraud lainnya yang sering terjadi adalah penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan, dengan persentase 28.9% atau dipilih oleh 69 responden. Sementara itu, fraud laporan keuangan menempati posisi berikutnya dengan persentase 6.7% atau dipilih oleh 16 responden. Selain itu secara keseluruhan, kerugian akibat fraud dengan nilai lebih dari Rp.10 miliar paling banyak dialami oleh pemerintah, yakni sebesar 20.8%. Selanjutnya, organisasi atau lembaga nirlaba mengalami kerugian sebesar 17.4%, diikuti oleh perusahaan swasta dengan 13.3%. Organisasi atau lembaga nirlaba lainnya mencatat kerugian sebesar 13%, sementara perusahaan BUMN mengalami kerugian sebesar 11.1%.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik berarti metode penilaian teknis dan akuntansi untuk pengelolaan uang rakyat oleh pemerintah pusat, lembaga tinggi negara, departemen, badan pelayanan publik, pemerintah daerah, badan pelayanan publik, lembaga sosial masyarakat, yayasan sosial, dan proyek kerja sama antara perusahaan sektor publik dan swasta. Sekitar tahun 1950-an, sektor publik memainkan peran penting dalam membuat dan menerapkan strategi pembangunan negara. Akuntansi sektor publik berkontribusi pada pembuatan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pembangunan nasional, dan hal ini berhubungan dengan pengelolaan ekonomi makro. Pencatatan, pengkategorian, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi adalah bagian dari pekerjaan jasa akuntansi sektor publik. Pada akhirnya, ini menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan untuk keputusan. Selain itu, informasi ini berlaku untuk bagaimana lembaga tingkat tinggi negara mengelola dana publik. (Sujarweni, 2021)

Akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang dengan cepat dalam hal penerapan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi, yang berarti mereka memiliki wewenang untuk memilih cara mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi mereka. Akibatnya, mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (Ratmono & Frendy, 2022). Akuntansi sektor publik berbeda dari entitas ekonomi lainnya terutama perusahaan komersial yang berusaha menghasilkan keuntungan tetapi juga melakukan transaksi keuangan dan ekonomi.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun (Pemerintah, 2008) menyatakan bahwa "Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik. Ini berbeda dari pengawasan akuntansi dan administratif karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suatu instansi pemerintah melakukan tugas dan fungsinya secara efisien dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Pemerintah, 2008), pengendalian internal adalah proses dan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara memadai melalui operasi yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

akurat, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelima komponen yang saling berhubungan dari sistem pengendalian internal pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tanggung jawab, tanggung jawab, dan akuntabilitas pemerintah dapat ditingkatkan melalui pengawasan internal. Dengan pelaksanaan yang lebih baik, kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Selain itu, pengawasan internal dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan prestasi, mencegah kehilangan sumber daya, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang untuk menghindari reputasi buruk. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mencegah peristiwa yang tidak menguntungkan dan membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. (Yusri & Marzuenda, 2022)

Pengawasan internal mencakup seluruh rantai tindakan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan internal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam membangun tata pemerintahan yang baik. Pengawasan internal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai audit internal pemerintah, yang dapat melaporkan peluang untuk korupsi, sehingga pemerintah dapat menghilangkan peluang tersebut.

Unit atau aparat pengawasan yang didirikan dalam organisasi sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi disebut pengawasan internal. Pengawasan ini mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan organisasi; data ini menunjukkan seberapa baik proyek berjalan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan seorang pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin harus mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Sebaliknya, para pemimpin juga memiliki kemampuan untuk membantu bawahannya, yang memiliki kontrol internal, dalam meningkatkan pelaksanaan tugas. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal adalah upaya untuk memastikan bahwa operasi pemerintah, mulai dari pelaksanaan program hingga pengelolaan keuangan daerah, dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur agar pengelolaan keuangan tidak terjadi kesalahan (Tadjudinsyah, 2018)

Akuntabilitas, nilai uang, kejujuran, transparansi, dan pengendalian adalah prinsip di balik pengawasan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol kecurangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dapat dianggap sebagai elemen yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah. Menurut (Omar et al., 2014), fraud didefinisikan sebagai risiko atau ancaman bisnis yang dapat terjadi di mana pun entitas bisnis, baik swasta maupun publik. Namun, fraud secara eksplisit berarti penipuan, kecurangan, atau penggelapan (Ratmono & Frendy, 2022). Korupsi, penyelewengan aset, dan pemalsuan laporan keuangan adalah tiga jenis kecurangan yang dikenal sebagai kecurangan (Suryani, 2019).

Studi yang melihat bagaimana pengendalian internal berpengaruh pada pencegahan penipuan telah mencapai berbagai kesimpulan. Menurut analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sektor pemerintah pada pegawai keuangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kecenderungan untuk melakukan kecurangan (fraud) tidak dipengaruhi oleh keefektifan sistem pengendalian atau kesesuaian kompensasi (Kurrohman et al., 2017). Namun, menurut penelitian (Kurniasari et al., 2018), pengendalian internal menjadi elemen paling penting yang berdampak pada pencegahan

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

penipuan. (Nurjanah & Sastrodiharjo (2021) menemukan bahwa implementasi pencegahan fraud meningkat seiring dengan peningkatan kualitas dan efektivitas model akuntansi sektor publik dan pengawasan pengelolaan. Namun, sistem dan individu adalah sumber utama penipuan, menurut penelitian (Hendrik & Meiranto, 2016)

Sebuah penelitian sebelumnya, "Pengaruh Penerapan Model Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud", ditulis oleh "Fauziah & Setyawan, (2022)" menemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dapat mengurangi fraud sektor publik jika dilakukan dengan mempertimbangkan aspek seperti akuntabilitas kinerja dan penerapan teknik pencegahan fraud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan untuk menghindari penipuan dapat ditingkatkan jika pengendalian internal diterapkan sesuai dengan protokol operasi konvensional. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Wijayanti & Setyawan (2022) dengan judul "Analisis Pengendalian Internal dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik." Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi meningkatkan tingkat keberhasilan pencegahan kecurangan akuntansi di organisasi sektor publik.

Namun jika pengendalian internal kurang efektif maka akan mengakibatkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi mudah terjadi. Penelitian mengenai "Pengaruh Penerapan Model Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud" ini penting untuk dilakukan guna mengetahui, menganalisis, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana pengaruh penerapan model akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan fraud yang membedakan serta menjadi keterbaruan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di beberapa Pemerintah Kota Malang yang sudah disebutkan oleh peneliti yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus langsung pengelolaan keuangan daerah kota Malang. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu karena penulis berusaha menggabungkan beberapa variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan menggabungkan variabel-variabel tersebut menjadi satu dan akan diteliti..

METODE PENELITIAN

berasal dari positivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Metode ini menggunakan data statistik dan kuantitatif untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan populasi dari kuisisioner yang mengumpulkan data dari bagian perencanaan dan anggaran, bagian keuangan dan akuntansi, dan bidang perbendaharaan. Sampel penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Inspektorat Kota Malang. Karena selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2020-2023 OPD/SKPD tersebut tentu memiliki anggaran yang cukup besar, kemudian mengelola keuangan dan untuk Inspektorat tentunya mengetahui OPD mana yang mengalami fraud karena peran Inspektorat sebagai supervisi yang mengawasi keuangan dari semua pemerintahan yang ada di kota Malang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan menggunakan kuisisioner penelitian yang telah diberikan kepada karyawan dari berbagai lembaga pemerintahan di Kota Malang meliputi, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Dinas Pekerjaan Umum. Ada pula metode pengumpulan sampel pada riset ini yaitu menggunakan sampel penuh

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga ditemukan jumlah sampel sebanyak 65 sampel

Untuk memprediksi keadaan (naik turunnya) variabel dependen dalam skenario di mana nilai dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor berubah atau berkurang, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Oleh karena itu, jika setidaknya ada dua variabel independen, analisis regresi ganda akan dilakukan. Teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Pada Penelitian ini variabel yang diuji yaitu meliputi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud. Kemudian, variabel tersebut diuji secara statistik deskriptif menggunakan SPSS yang akan menghasilkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hasil dari statistik deskriptif responden pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	65	33	60	49,05	6,234
Pengawasan Internal (X2)	65	33	60	48,55	6,96
Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3)	65	34	60	49,58	6,232
Pencegahan <i>Fraud</i> Anggaran (Y)	65	36	60	49,6	5,747
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Hasil Pengujian Validitas

Berdasarkan perhitungan diketahui jika tiap unsur pernyataan bagi variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud Anggaran memenuhi kriteria 0,2441 (r tabel). Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau dengan cara statistik tiap-tiap indikator pernyataan merupakan valid serta pantas digunakan selaku data penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari tabel 2 dan dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisisioner reliabel dan dapat diterima.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Std	N of Items	Cronbach's Alpha	Ket
PASP (X1)	0,6	12	0,914	Reliabel

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

PI (X2)	0,6	12	0,944	Reliabel
PPK (X3)	0,6	12	0,941	Reliabel
PFA (Y)	0,6	10	0,919	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Bersumber dari Tabel 2 ditunjukkan jika koefisien reliabilitas instrumen Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3) terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y), membuktikan angka koefisien Cronbach's Alpha > 0,60 alhasil dapat ditarik kesimpulan jika seluruh instrumen pada riset merupakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil pengujian Kolmogrov Smirnov didapatkan angka yang signifikan yaitu 0,051 yang artinya lebih dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas Data

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, ditunjukkan jika VIF bagi semua variabel bebas dari nilai tolerans > 0,100 dan VIF < 10,00. Sehingga dapat menarik kesimpulan jika model regresi itu tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas Data

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji glejser membuktikan bahwa totalitas variabel mempunyai angka signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini bebas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi Data

Pada uji autokorelasi ini memiliki tujuan untuk apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan gangguan pada periode lainnya. Autokorelasi tersebut muncul karena pengamatan yang berurutan dilakukan sepanjang periode yang asling terkait satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi tanpa autokorelasi. Untuk melihat apakah ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian dengan Durbin-Watson (DW), dengan, dengan nilai $Du < DW < 4-Du$. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,882	0,779	0,768	2,77	1,838

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 3, dapat diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,838 dengan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson untuk k=3 dan n= 65 maka diperoleh $2,304 > DW > 1,6960$. Maka dapat disimpulkan bahwa $dL < DW < (4-dU)$ dengan nilai $1,6960 < 1,838 < 2,304$ sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

Uji regresi linear berganda digunakan untuk melihat apakah hubungan positif atau negatif atau tidak terdapat hubungan antara variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1), pengawasan internal 65 (X2), pengawasan pengelolaan keuangan (X3) terhadap pencegahan fraud anggaran (Y). Berikut hasil uji analisis regresi linear berganda:

Tabel 4 Hasil Uji Analisi Linear Berganda Model

Model	Undstndred B	Coeff Std.Error	Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
1 (Constan)	9,293	3,1		2,998	0,004
PASP	0,018	0,09	0,02	0,195	0,846
PI	0,176	0,133	0,203	1,324	0,191
PPK	0,622	0,138	0,678	4,501	0

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Dari tabel 4 dapat dijelaskan masing-masing pengujian hipotesis sebagai berikut :
 $Y = 9,293 + 0,018 X_1 + 0,176 X_2 + 0,622 X_3$

Hasil Uji t

Hasil uji t dapat dilihat berdasarkan tabel 4 yang menghasilkan :

- Hasil hipotesis 1 (H1) diperoleh memiliki nilai signifikansi berskor $0,846 > 0,05$ dan nilainya t hitung $0,195 < t$ tabel $1,99962$. Dimana H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian kesimpulan yang didapat yakni H1 mengalami penolakan yang artinya tidak ditemukan pengaruh antara pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).
- Hasil hipotesis 2 (H2) diperoleh memiliki nilai signifikansi berskor $0,191 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,324 < t$ tabel $1,99962$. Dimana H2 ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian kesimpulan yang didapat yakni H2 mengalami penolakan yang artinya tidak ditemukan pengaruh antara pengaruh variabel Pengawasan Internal (X2) terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).
- Hasil hipotesis 3 (H3) diperoleh memiliki nilai signifikansi berskor $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,501 > t$ tabel $1,99962$. Dimana H3 mengalami penerimaan dan H0 ditolak. Dengan demikian kesimpulan yang didapat yakni H2 mengalami penerimaan yang artinya ditemukan pengaruh antara pengaruh variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X2) terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).

Hasil Uji f

Secara simultan, pengujian dilakukan dengan melaksanakan uji-f test. Uji statistik f ini mencerminkan ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersamaan yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 5 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

1	Regression	1645,58	3	548,527	71,493	0
	Residual	468,02	62	7,672		
	Total	2113,6	64			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Pengujian H5 pada tabel 5 dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3) secara bersamaan terhadap Y yakni berskor $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $71,493 > F$ tabel 2,75. Maka dapat ditarik kesimpulan adanya penerimaan H5 yang bermakna ditemukan pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3) secara bersamaan terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Pencegahan Fraud Anggaran

Hasil regresi pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Pencegahan Fraud (Y) menghasilkan nilai signifikansi berskor $0,846 > 0,05$ dan nilainya t hitung $0,195 < t$ tabel 1,99962. Dimana H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian kesimpulan yang didapat yakni H1 mengalami penolakan yang artinya tidak ditemukan pengaruh antara pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem implementasi akuntansi sektor publik tidak mempengaruhi pengurangan penipuan anggaran. Karena penerapan akuntansi sektor publik tidak dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga berdampak negatif dan kecil terhadap pencegahan fraud anggaran. Setiap SKPD memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah, yang dapat berdampak pada kinerja mereka dan memicu kecurangan. SKPD Kota Malang tidak memiliki sumber daya pengambilan keputusan yang diperlukan untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas akuntansi sektor publik tidak akan mempengaruhi pencegahan penipuan secara langsung, dan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak mempengaruhi pencegahan penipuan.

Studi ini sejalan dengan Nurhani Salamah (2020) dimana hasil penelitian di dapatkan bahwasanya secara negatif tidak ditemukan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan belum menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan.

Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Pencegahan Fraud Anggaran

Hasil regresi pengaruh Pengawasan Internal (X2) terhadap Pencegahan Fraud (Y) menghasilkan nilai signifikansi berskor $0,191 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,324 < t$ tabel 1,99962. Dimana H2 ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian kesimpulan yang didapat yakni H2 mengalami penolakan yang artinya tidak ditemukan pengaruh antara pengaruh variabel Pengawasan Internal (X2) terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).

Berdasarkan pernyataan yang digunakan dalam pengambilan sampel ini, hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Salah satu resiko yang dihadapi oleh pemerintahan adalah jika pengendalian internal tidak dilaksanakan dengan baik, kecurangan akan mudah terjadi dan berdampak buruk pada kinerja. Pengendalian internal juga merupakan proses menilai kinerja dengan memperhatikan kepuasan karyawan dalam bekerja dengan

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

maksimal, dan tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Hasil yang didapat selaras dengan bukti yang disampaikan (Damayanti & Primastiwi, 2021) dimana hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya secara negatif tidak ditemukan pengaruh pengawasan internal terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini bermakna bahwa instansi pemerintah sudah memiliki peraturan tertulis mengenai standar operasional prosedur sehingga para pegawai dapat menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai SOP.

Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud Anggaran

Hasil regresi pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X2) terhadap Pencegahan Fraud (Y) menghasilkan nilai signifikansi berskor $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,501 > t$ tabel $1,99962$. Dimana H_3 mengalami penerimaan dan H_0 ditolak. Dengan demikian kesimpulan yang didapat yakni H_2 mengalami penerimaan yang artinya ditemukan pengaruh antara pengaruh variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X2) terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).

H_3 menyatakan bahwa ada bukti yang kuat untuk mendukung pengaruh terhadap pencegahan penipuan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan dapat secara signifikan memengaruhi upaya pencegahan penipuan. Kesimpulannya, peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dapat membantu mencegah penipuan di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan mengarah pada peningkatan pencegahan penipuan. Apabila organisasi menerapkan pengawasan pengelolaan keuangan dengan lebih baik, fraud dapat dicegah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, otoritas untuk pengelolaan keuangan daerah mencakup semua jenis kegiatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan pembukuan. Kewenangan ini tidak akan diterapkan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud sangat konsisten dengan teori, logis, dan transparan. Maka pengawasan pengelolaan keuangan dianggap dapat mempengaruhi aktor dalam upaya mencegah terjadinya fraud dan dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan tersebut akan menghilangkan adanya peluang bagi pegawai untuk melakukan fraud.

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud Anggaran

Hasil pengujian H_5 dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3) secara bersamaan terhadap Y yakni berskor $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $71,493 > F$ tabel $2,75$. Maka dapat ditarik kesimpulan adanya penerimaan H_5 yang bermakna ditemukan pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2) dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3) secara bersamaan terhadap Pencegahan Fraud Anggaran (Y).

Sesuai dengan hasil diatas dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, pengawasan pengelolaan keuangan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan fraud. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut saling berperan dalam mendukung upaya pencegahan terjadinya fraud dalam efektivitas pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan publik atau suatu instansi pemerintahan. Hasil ini dapat menjadi dasar penting

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan publik agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau fraud didalamnya.

Menurut penelitian sebelumnya (Nurjanah & Sastrodiharjo, 2021), penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang lebih baik dan lebih efektif terkait dengan tingkat keberhasilan implementasinya. Selain itu, pengawasan pengelolaan keuangan juga semakin baik dan efektif dalam mencegah kesalahan atau penipuan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan mempertimbangkan hal-hal seperti ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan data yang terkumpul dan uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud anggaran di pemerintah Kota Malang. Semakin tinggi penerapan akuntansi sektor publik tidak menjamin terjadinya penurunan fraud anggaran. Selain itu, pengawasan internal juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap pencegahan fraud anggaran, yang berarti pengawasan internal yang lebih baik tidak selalu memastikan penurunan fraud anggaran. Namun, pengawasan pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas pencegahan fraud. Secara simultan, penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan pengawasan pengelolaan keuangan bersama-sama mempengaruhi pencegahan fraud anggaran, sehingga peningkatan ketiga faktor ini dapat mempengaruhi secara signifikan pencegahan fraud di pemerintah Kota Malang.

SARAN

Dalam penelitian ini peneliti mengusulkan sejumlah saran yang menggunakan topik ini :

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat dikemukakan bagi pemerintah Kota Malang adalah diharapkan untuk dapat memaksimalkan lagi penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal pemerintahannya. Dan diharapkan pimpinan dapat lebih paham bahwa alangkah baiknya jika pegawai pada bagian pengelola keuangan, anggaran, aset mempunyai latar belakang pendidikan dari hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, sehingga dapat lebih mudah dalam memahami alur dan prosedur yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kemudian saran selanjutnya ditujukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel baru yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud anggaran di instansi pemerintahan khususnya Kota Malang. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya disarankan supaya lebih mengembangkan studi dengan menggunakan faktor lainnya yang mempengaruhi atau berdampak pada pencegahan fraud yang tidak dipakai untuk penelitian ini sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal , Good Corporate Governance , dan Sistem Pengukuran Kinerja. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 1–14. <https://36.89.54.123/index.php/invoice/article/download/6029/pdf>
- Fauziah, A., & Setyawan, S. (2022). Pengaruh Penerapan Model Akuntansi Sektor Publik Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 23–31. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.335>
- Hendrik, V., & Meiranto, W. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penerimaan Dan Perilaku Penggunaan Sistem Informasi (Studi Kasus Penerapan

DOI: <https://doi.org/10.24127/ajpm>

- System Application Product pada PT Bumi Muria Jaya Karawang-Jawa Barat). *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(4).
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633
- Kurrohman, T., Lailiyah, A., & Wahyuni, N. I. (2017). Determinant of fraudulent in government: An empirical analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia.
- Lubis, D. K. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Dan Pengetahuan Fraud Terhadap Pencegahan Fraud. *Jambura Economic Education Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.37479/jeej.v5i1.14323>
- Nurjanah, N., & Sastrodiharjo, I. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud. *Media Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 65–76. <https://mia.iaikapddkijakarta.id/index.php/mia/article/view/6%0Ahttps://mia.iaikapddkijakarta.id/index.php/mia/article/download/6/6>
- Omar, N., Koya, R. K., Sanusi, Z. M., & Shafie, N. A. (2014). Financial Statement Fraud: A Case Examination Using Beneish Model and Ratio Analysis. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(2), 184–186. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2014.v5.367>
- Pemerintah, P. (2008). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, 76(3), 61–64.
- Ratmono, D., & Frendy. (2022). Examining the fraud diamond theory through ethical culture variables: A study of regional development banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2117161>
- Sujarweni, W. (2021). Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian. Pustaka Baru Press.
- Suryani, I. C. (2019). Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016 – 2018. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5780>
- Tadjudinsyah, M. A. (2018). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik. *E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*, 1–19.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2022). Litelature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334>
- Yusri, Y., & Marzuenda, M. (2022). Model Pembelajaran Virtual Learning Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 10(2), 111–125. <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v10i2.421>

